

Menko Polhukam Masih Selidiki Soal Isu Densus 88 Buntuti Jampidsus

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya masih mendalami soal isu anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menguntit Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan, Febrie Adriansyah.

"Saya kira permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan namun saat ini masih dalam penyidikan pendalaman," kata Hadi kepada wartawan, di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).

Hadi tak membeberkan pihak mana saja yang terlibat melakukan pendalaman isus Jampidsus dibuntuti anggota Densus 88. Hadi ungkap bahwa ia sudah berbicara dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitair Burhanuddin.

Kedua petinggi penegak hukum itu akan tetap fokus menjalankan tugasnya sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing. Bahkan Kapolri dan Jaksa Agung juga sudah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (27/5) kemarin, meski mantan Panglima TNI ini tak mengetahui persis isi apa yang dibahas Kapolri dan Jaksa Agung saat bertemu Presiden Jokowi di Istana.

"Saya lihat kedua sudah kelihatannya menghadap Bapak Presiden tapi yang dibicarakan saya tidak tahu, dari jauh saja dan mudah-mudahan ke depan ini semuanya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya diceritakan bahwa Jampidsus Kejaksaan Febrie Adriansyah diduga dibuntuti oleh anggota Densus 88, saat berada di saah satu restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (19/5).

Disebutkan ada dua orang anggota Densus 88 yang membuntuti Febrie. Aksi anggota Densus 88 tersebut lantas diketahui oleh Polisi Militer yang ditugaskan mengawal Febrie semenjak Kejaksaan mengusut kasus korupsi tim senilai Rp 271 triliun.

Sementara itu, Kapolri mengaku tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu.

"Kan dengan Pak Jaksa Agung kan sudah sama-sama enggak ada masalah," kata Listyo di Istana Senayan, Senin (27/5).

Listyo pun tidak menanggapi lebih lanjut saat ditanya tindak lanjut lembaga yang atas arahan itu. Ia hanya menyebut bahwa tidak ada masalah di antara dua instansi. ● **mei**

Bencana Longsor di Arfak, Empat Warga Ditemukan Tewas

JAKARTA (IM) - Tim gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap korban hilang pascalongsor yang melanda Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, Minggu (26/5).

Berdasarkan data per Senin (27/5) pukul 15.00 WIB, tim gabungan kembali menemukan dua korban dalam kondisi meninggal dunia.

Dua korban longsor ditemukan di Distrik Minyambouw oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI-Polri, BPBD dan instansi lainnya. Proses pencarian dilakukan penggalian dengan alat berat ekskavator dilokasi longsor.

"Dengan demikian, total korban tercatat empat orang meninggal dunia akibat kejadian ini," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangan resminya, Selasa (28/5).

Sebelumnya dilaporkan, tim menemukan seorang yang selamat dari bencana longsor tersebut. Tim gabungan segera melakukan evakuasi dan membawa korban selamat ke Rumah Sakit Warmare untuk mendapat-

kan perawatan lebih lanjut. Operasi pencarian juga telah dihentikan mengingat seluruh korban telah ditemukan.

Meski demikian, tim gabungan masih berada dilokasi guna melakukan upaya percepatan penanganan dan mengantisipasi adanya potensi longsor susulan. Merujuk prakiraan cuaca BMKG dua hari kedepan (30/5), wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan.

Menyikapi hal itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau kepada masyarakat agar selalu memperbarui informasi prakiraan cuaca dari BMKG. Apabila terjadi perubahan cuaca secara signifikan, diharap kepada seluruh pemangku kebijakan di daerah bersama masyarakat dapat mengantisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan.

Apabila terjadi hujan lebat hingga jarak pandang berkurang dari 100 meter dalam durasi tiga jam lebih, diharap agar masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman, khususnya bagi yang tinggal di daerah lereng tebing maupun bantaran sungai. ● **mar**

KY akan Dalam Pelanggaran Etik Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

JAKARTA (IM) - Komisi Yudisial (KY) bakal menginvestigasi ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan hakim Tipikor Jakarta usat atas putusan sela mengabukan eksepsi, atau nota pembelaan Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh

Anggota sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan, respons tersebut tidak lepas dari kasus Gazalba yang menjadi sorotan publik. Akan tetapi, dia menjelaskan, pihaknya tidak berwenang untuk masuk wilayah pertimbangan hakim. Sebab, hal itu sudah masuk ke ranah teknis yudisial.

Menurutnya, hakim memiliki kewenangan penuh dan independen dalam setiap mengadili perkara. Sehingga, KY tidak bisa menganalisis lebih dalam hingga putusan berkekuatan hukum. Meski begitu, kata dia, KY memiliki kewenangan untuk

menelusuri adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam memutuskan tersebut.

"Meskipun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi putusan dapat menjadi pintu masuk bagi KY untuk menelusuri adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," kata Mukti dalam keterangannya, Selasa (28/5).

"Dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai informasi dan keterangan yang mengarah terhadap dugaan adanya pelanggaran etik dan perilaku hakim pada kasus tersebut dengan menurunkan tim investigasi," ujarnya.

Lebih jauh, Mukti mengajak seluruh pihak untuk tetap mengawal kasus yang menyeret nama Hakim Agung nontaktif Gazalba Saleh tersebut. "Inilah yang akan KY lakukan dan mengajak semua pihak untuk memastikan mengawal kasus ini," jelasnya. ● **mei**

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



DPR PUTUSKAN EMPAT RUU JADI USUL INISIATIF

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) mengetuk palu saat Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan V di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5). Rapat tersebut menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diajukan (Baleg) DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI, serta tiga revisi undang-undang lainnya.

UKT Batal Naik Tahun Ini, Apakah Upaya Pemerintah untuk Redam Aksi Mahasiswa?

Sangat disayangkan kebijakan pemerintah membatalkan kenaikan UKT tidak disertai pencabutan Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2024.

JAKARTA (IM) - Setelah menaut protes keras dari para mahasiswa dan para orang tua, akhirnya pemerintah memutuskan membatalkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tahun ini.

Pengamat menilai, penundaan tersebut hanya upaya pemerintah untuk meredam aksi mahasiswa. Sebab tahu depan masih ada potensi UKT bakal naik. Pembatalan kenaikan UKT yang sifatnya sementara ini hanya untuk meredam kekecewaan dan aksi mahasiswa.

"Pembatalan kenaikan UKT ini jelas hanya bersifat sementara, hanya untuk

meredam aksi mahasiswa, dan tentu saja tidak menyelesaikan masalah," kata pengamat pendidikan, Ubaid Matraji, dalam siaran pers yang diterima, Selasa (28/5).

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPi), Ubaid, menayangkan kebijakan membatalkan kenaikan UKT tidak dibarengi dengan pencabutan Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2024 dan komitmen untuk mengembalikan status Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH) menjadi PTN.

Selama UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi tidak dicabut, semua PTN akan berstatus menjadi PTN-BH sehingga tetap ada pengalihan tanggung jawab pembiayaan pendidikan.

"Selama Permendikbudristek No.2 tahun 2024 tidak dicabut dan PTN-BH tidak dikembalikan menjadi PTN, maka bisa dipastikan, tarif UKT akan kembali naik di tahun 2025," ujarnya.

Ia menilai, respon pemerintah atas kenaikan UKT saat ini semakin jelas arahnya untuk tetap mempertahankan status PTN-BH.

Ubaid beranggapan, mempertahankan status PTN-BH akan memuluskan agenda komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

Lewat skema itu, biaya pendidikan tinggi tidak lagi menjadi tanggung jawab negara, tetapi tetap seperti sekarang yang diserahkan pada mekanisme pasar. Padahal

anggaran pendidikan sebesar Rp 665 triliun di APBN 2024 sangat mungkin untuk dialokasikan dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan jika kebijakan PTN-BH berlaku.

"Pemerintah saat ini tak lagi menggunakan APBN untuk mensubsidi PTN-BH. Dulu, ketika masih berstatus PTN, maka pemerintah punya kewajiban untuk membiayai PTN supaya terjangkau dan memperluas akses. Kini, dengan status PTN-BH, pemerintah tak lagi membiayai, tapi PTN-BH harus mandiri dalam pembiayaan," jelasnya.

Terlebih, bantuan untuk keluarga miskin seperti KIP-Kuliah banyak salah sasaran, bahkan kampus tidak memenuhi jumlah minimum 20 persen untuk mahasiswa dengan skema UKT kelompok 1 dan kelompok 2.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengembalikan pendidikan sebagai hak dasar seluruh warga negara Indonesia.

Pendidikan harus diletakkan sebagai *public goods* (barang publik), sebab menyangkut hajat hidup dan kebutuhan seluruh masyarakat.

"Setiap warga negara harus mendapat kesempatan

sama (non-excludability) untuk bisa akses pendidikan tinggi. Kampus janganlah hanya beri karpet merah untuk golongan tertentu. Semua punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berkeadilan," kata Ubaid.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan UKT pada tahun ini setelah ramai diprotes banyak pihak. Namun, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa kenaikan UKT bisa saja dimulai pada tahun depan agar tidak terlalu mendadak seperti yang terjadi belakangan ini.

Jokowi pun menekankan bahwa kenaikan UKT di setiap perguruan tinggi akan dikaji dan dikalkulasi terlebih dahulu oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

"Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan, ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang ini," kata Jokowi di Istana Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5). ● **han**

Novel Baswedan Gugat Batas Usia Pimpinan KPK ke Mahkamah Konstitusi

JAKARTA (IM) - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, bersama IM57+ Institut, mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (28/5).

Kedatangan Novel dan IM57+ Institut ke MK adalah dalam rangka mengajukan Judicial Review (JR) terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang mengatur batas usia pimpinan lembaga antirasuah.

"Alhamdulillah hari ini kami dari IM57 telah memasukkan permohonan untuk uji materi undang-undang KPK. Yang pada pokoknya sebagaimana tadi disampaikan pada Ketua IM57 bahwa kami melakukan permohonan terkait

dgn batas usia pimpinan KPK," ujar Novel di gedung MKRI, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).

Menurut Novel, kondisi KPK saat ini sungguh memprihatinkan, sebab permasalahan di dalam lembaga antirasuah telah ke level pimpinan. Dengan mengajukan JR itu menurutnya sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK.

Ia berharap, MK bisa mengabulkan gugatan yang diajukan, agar membatalkan UU KPK soal batas usia minimal pimpinan menjadi 40 tahun.

Saat ini, UU tersebut menyaratkan calon pimpinan KPK minimal berusia 50 tahun.

"Tentunya keprihatinan itu tidak hanya bisa dengan ucapan saja. Oleh karena

itu, kami bagian dari masyarakat tentunya dan upaya yang kami lakukan agar aturan soal batas usia ini bisa dikembalikan kepada undang-undang yang lama atau nanti kita akan sampaikan," ucapnya.

Menurut Novel, kalau gugatan yang diajukan ini dimaksudkan juga agar pemerintah bisa mencari pimpinan KPK yang berintegritas atau memiliki komitmen kuat dalam rangka pemberantasan korupsi.

"Yang poin penting adalah kita ingin agar terpilih pimpinan KPK yang berintegritas, yang paham dengan masalah di KPK dan punya pengalaman dan keberanian untuk bisa berbuat demi kepentingan pemberantasan korupsi," katanya. ● **han**

Oknum Polisi di Sulsel Kepergok Selingkuh, Langsung Tancap Gas hingga Istrinya Terseret

MAKASSAR (IM) - Oknum polisi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) kecapatan berduaan dengan wanita lain oleh istrinya. Setelah dipergoki, oknum polisi berinisial Bripda M, langsung tancap gas hingga istrinya terseret mobil yang dikendarainya.

DA (23) telah melaporkan suaminya, Bripda M, ke Mapolda Sulsel. Hal itu dilakukan lantaran sang istri sempat terseret mobil yang dibawa suaminya yang mencoba kabur saat kepergok selingkuh hingga 10 meter.

Bahkan, dalam video amatir juga merekam detik-detik sang istri menemukan suaminya berduaan bersama wanita lain di dalam sebuah mobil yang menghebohkan warga.

Dari rekaman video amatir, terlihat warga dihebohkan dengan seorang wanita yang mengamuk dan berteriak saat melihat suaminya tengah berduaan dengan wanita lain di dalam sebuah minibus saat hendak melintas di Jalan Racing Center, Makassar.

Sang istri berinisial DA (23) tersebut memergoki suaminya diduga selingkuh dengan wanita lain.

Bahkan, warga yang berada di lokasi juga sempat meneriak priand dan wanita yang berada di dalam mobil, namun wanita yang diduga istri oknum polisi ini berhenti mengamuk se-

telah suaminya diamankan polisi.

Pasca kejadian tersebut, sang istri melaporkan ke polisi setelah diduga mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya yakni Bripda M yang bertugas di Satuan Pelayanan Markas atau Yanma Polda Sulsel.

Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Didik Supranoto, kasus KDRT yang diduga dilakukan oleh Bripda M saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Ditkrimum Polda Sulawesi Selatan untuk kasus pidananya.

"Sedangkan untuk tindakan disiplinnya, oknum polisi tersebut juga menjalani pemeriksaan di Bidpropam Polda Sulsel," ujar Kombes Pol Didik Supranoto, Selasa (28/5).

Untuk diketahui, DA mencurigai dengan gelagat suaminya. Kemudian ia mendapati suaminya menjemput wanita lain di salah satu rumah kos.

Sang suami Bripda M yang sempat panik melihat istrinya itu di pinggir jalan lalu tancap gas hingga sang istri yang sempat memegangi gagang pintu mobil, terseret hingga terpelantik sekira 10 meter. Akibatnya, sang istri mengalami luka lecet dan lebam hampir di seujur tubuhnya. ● **lus**



PEMBANGUNAN RS BHAYANGKARA JOMBANG

Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto (kiri), Karojemengar Srena Polri Brigjen Pol Andik Setiyono (kedua kiri), dan Pj Bupati Jombang Sugiat (ketiga kiri) melihat maket masterplan saat groundbreaking pembangunan Rumah Sakit (RS) Bhayangkara di Jombang, Jatim, Selasa (28/5). Polri menggelontorkan anggaran Rp30 miliar untuk pembangunan RS Bhayangkara Jombang di atas lahan seluas tiga ribu meter dan ditargetkan selesai pada November 2024.